

SINERGI LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM MENDUKUNG FINANCIAL INCLUSION

Sunitha Devi¹, Putu Riesty Masdiantini², Nyoman Trisna Herawati³, Lucy Sri Musmini⁴

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha
sunitha.devi@undiksha.ac.id

Abstract

This study aims to examine the synergy between the TAM theory and the theory of consumer behavior in encouraging the use of a product or service. This study aims to reveal the effectiveness of digital-based service programs, risk management, and implementation of local wisdom in rural financial institutions in increasing the financial inclusion of rural communities who are still quite far from urban communities. The research was conducted using mixed methods approach. The mixed methods model chosen was explanatory sequential, namely a combination research method combining quantitative and qualitative research methods sequentially. Based on the calculation of the number of samples developed by Isaac and Michael the sample used in this study was 258 people. Data analysis on the quantitative approach was carried out using multiple linear regression models. The results showed: 1) E-Link Service has a positive effect on Financial Inclusion, 2) Perceived Risk Management has a positive effect on Financial Inclusion, and 3) Tri Hita Karana has a positive effect on Financial Inclusion. The results of this research can be used as a basis for LPD management to make improvements or various forms of improvement towards providing excellent E-Link services, implementing Risk Management and the Tri Hita Karana concept more optimally to optimize the use of LPD services by customers.

Keywords: E-Link; Risk; Budaya; Financial inclusion

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji sinergi antara teori TAM dan teori perilaku konsumen dalam mendorong penggunaan suatu produk atau jasa. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas program layanan berbasis digital, manajemen risiko, dan implementasi kearifan lokal pada lembaga keuangan pedesaan dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat pedesaan yang masih cukup jauh dari masyarakat perkotaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan mixed methods. Model mixed method yang dipilih adalah sequential explanatory yaitu metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Berdasarkan perhitungan jumlah sampel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 258 orang. Analisis data pada pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan: 1) E-Link Service berpengaruh positif terhadap Financial Inclusion, 2) Perceived Risk Management berpengaruh positif terhadap Financial Inclusion, dan 3) Tri Hita Karana berpengaruh positif terhadap Financial Inclusion. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi manajemen LPD untuk melakukan perbaikan atau berbagai bentuk perbaikan menuju penyediaan layanan E-Link yang prima, penerapan Manajemen Risiko dan konsep Tri Hita Karana secara lebih optimal untuk mengoptimalkan penggunaan layanan LPD oleh nasabah.

Kata Kunci: E-Link; Risk; Budaya; Financial Inclusion

Cronicle of Article: Received (February); Revised (April); and Published (June).

©2021 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.

Profile and corresponding author: Sunitha Devi, Putu Riesty Masdiantini, Nyoman Trisna Herawati and Lucy Sri Musmini are from the Accounting Study Program, Faculty of Economics, Universitas Pendidikan Ganesha. Corresponding Author: sunitha.devi@undiksha.ac.id

How to cite this article: Devi S., Masdiantini, P. R., Herawati, N. T., & Musmini, L. S., (2021). Sinergi Lembaga Perkreditan Desa dalam Mendukung Financial Inclusion. Jurnal Kajian Akuntansi, 5(1), 86-112

PENDAHULUAN

Financial inclusion (inklusi keuangan) pada era pembangunan global ini menjadi salah satu yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Inklusi keuangan ialah meningkatnya partisipasi dan kesempatan masyarakat untuk mengakses keuangan yang khususnya pada masyarakat *unbanked* (Abubakar dan Handayani, 2019). Inklusi keuangan ialah kebijakan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan (Yanti, 2019). Ketidakberdayaan sebuah kelompok untuk mendapatkan akses pada sistem keuangan membuat adanya disparitas dan kemiskinan ekonomi diantara kelompok masyarakat, seperti yang terjadi di Afrika yaitu kelompok UKM sebagian besar tidak memiliki rekening bank dan kesulitan mendapatkan akses keuangan untuk pinjaman (Kunt and Klapper, 2013). Demikian juga di Indonesia, adanya fakta bahwa tidak semua penduduk Indonesia memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi menyebabkan pentingnya inklusi keuangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Irsyadinnas, 2019). Mengacu pada hasil survei oleh OJK tahun 2019, indeks inklusi keuangan pada masyarakat di area perkotaan sebanyak 83,60%, sedangkan pada masyarakat di area pedesaan sebesar 68,49%. Ketimpangan yang cukup signifikan antara indeks inklusi keuangan masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan menyebabkan pentingnya suatu layanan keuangan yang dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat pedesaan. Pemerintah yang diwakili oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memprogramkan berbagai layanan keuangan berbasis digital dan layanan laku pandai sebagai solusi untuk mencapai perluasan akses bagi masyarakat yang terbatas terhadap layanan keuangan yang disebabkan oleh jarak yang jauh untuk menjangkau bank, termasuk efisiensi biaya dan waktu sehingga dapat

dimanfaatkan oleh semua kelompok masyarakat. Dengan program tersebut, pemerintah berharap target inklusi keuangan tahun 2019 sebesar 75% yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dapat tercapai secara maksimal. Implikasi layanan keuangan berbasis digital pada peningkatan inklusi keuangan telah terbukti melalui penelitian yang dilakukan oleh Nurfalah dan Rusydiana (2019). Layanan keuangan berbasis digital ialah layanan jasa sebuah sistem pembayaran ataupun layanan jasa keuangan lainnya secara *online* melalui bantuan sarana teknologi diantaranya yakni *mobile based* ataupun *web based* yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Hanya lembaga keuangan dalam skala besar seperti perbankan yang sudah familiar terhadap pemberian layanan keuangan berbasis digital. Lembaga keuangan yang ada di desa juga seharusnya memberikan layanan keuangan berbasis digital untuk membantu peningkatan inklusi keuangan masyarakat pedesaan. Strategi tersebutlah yang mulai diadopsi oleh beberapa lembaga keuangan desa yang ada di Bali melalui sinergitas dengan perbankan.

Bali merupakan provinsi pertama yang mengembangkan lembaga keuangan mikro milik dari desa adat dimana pendiriannya berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 tahun 2012 dan kebijakan lokal *awig-awig* (pranata sosial di Bali dan juga merupakan sekumpulan aturan tertulis ataupun tidak tertulis berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana*). LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki desa pakraman memiliki sifat otonom dan unik, tidak tunduk pada kebijakan pemerintah pusat dan hanya berpedoman pada kebijakan local dimana itu adalah karakteristik yang khas dan kearifan local masyarakat di bali yang bertujuan pada penguatan ekonomi dan sosial budaya pada masyarakat adat bali. Lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat dikenal dengan sebutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ialah lembaga

keuangan milik desa adat yang berkedudukan di wewidangan desa adat (Perda Provinsi Bali, 2017). Erat kaitannya untuk melestrikan dan memperluas pertumbuhan desa adat di bali maka basis dibentuknya LPD ialah di desa adat (Mulyawan dkk., 2017). Aktivitas bisnis LPD antara lain mengumpulkan dan mendistribusikan dana, juga pelayanan jasa keuangan lainnya. Peran LPD tersebut menyerupai peran bank konvensional hanya saja lingkup usahanya ada pada desa adat. LPD sebagai penopang perekonomian di wilayah desa adat diharapkan mampu membantu pencapaian target inklusi keuangan. LPD kini telah membuka diri terhadap perkembangan teknologi melalui sinergi layanan berbasis digital dengan pihak perbankan. Sebagian besar LPD di Bali telah terhubung dengan jasa layanan *E-Link* milik perbankan, sehingga mempermudah LPD didalam memberikan jasa layanan keuangan berbasis digital kepada para nasabahnya. *E-Link* merupakan pengembangan fitur layanan laku pandai yang diperuntukkan untuk memberikan layanan keuangan daring kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat pedesaan yang dapat diakses selama 24 jam melalui aplikasi di ponsel pintar. Hasil studi dari Nurfaiah dan Rusydiana (2019) memberikan bukti bahwa aplikasi *connected* tersebut dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan. Hasil penelitian Mulasiswi dan Julialevi(2020) juga menunjukkan bahwa teknologi keuangan berpengaruh positif pada inklusi keuangan.

Membentuk sebuah peluang meningkatkan inklusi keuangan secara efektif melalui layanan keuangan berbentuk digital untuk meminimalisir biaya transaksi karena tidak diperlukan lagi layanan keuangan dalam bentuk tradisional dimana berbentuk sebuah jaringan kantor. Apalagi ditengah situasi pandemi COVID 19 yang mulai terjadi di Indonesia pada pertengahan awal bulan Maret 2020 yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan *less contact*

economy, tentunya pemanfaatan *E-Link service* akan semakin diperlukan sehingga ini akan menjadi kekuatan didalam mendorong pencapaian target inklusi keuangan. Dalam pengaplikasiannya, perlu adanya dukungan untuk pemahaman atas risiko layanan keuangan digital tersebut agar perusahaan dapat mengambil langkah mitigasi risiko atas risiko yang mungkin bisa timbul dari layanan keuangan secara digital. Sebagai unit bisnis, LPD juga sudah sepatutnya menerapkan *risk management* didalam menjalankan aktivitas bisnis. *Risk management* tidak hanya berfokus pada layanan berbasis digital yang rentan terhadap *hacker*, tetapi juga terhadap aktivitas operasional lainnya. Perusahaan dengan manajemen resiko yang buruk akan menghadapi kesulitan dalam menjaga kesinambungan usaha yang dilakukan perusahaan karena banyaknya resiko yang dihadapi baik dari luar maupun dalam. Fenomena *fraud* yang melibatkan oknum pengurus LPD Desa Pekaraman Tuwed Jembrana tahun 2018 merupakan contoh dari risiko internal pada perusahaan yang bisa terjadi dikarenakan lemahnya atau buruknya manajemen risiko pada perusahaan (*enterprise risk management*). Keadaan yang demikian tentu akan berdampak buruk terhadap kepercayaan nasabah. Pengimplementasian *Enterprise Risk Management (ERM)* pada sebuah perusahaan memberikan banyak bantuan dalam mengontrol aktivitas dari manajemen sehingga nantinya perusahaan bisa meminimalisir terjadinya *fraud* yang merugikan perusahaan. Target inklusi keuangan tentu tidak akan tercapai apabila banyak LPD yang berfungsi sebagai penopang perekonomian desa tidak mampu lagi beroperasi dan telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat sekitar. Persepsi risiko atas produk atau layanan suatu lembaga keuangan sangat berpengaruh terhadap penggunaan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan tersebut, seperti yang dinyatakan dalam teori perilaku konsumen dari Kotler and

Keller (2012) yang menyatakan bahwa perilaku penggunaan sebuah produk atau layanan salah satunya dipengaruhi dari elemen psikologi diantaranya yakni persepsi, motivasi, keyakinan, dan pengetahuan. Pernyataan tersebut sejalan dengan kesimpulan studi dari Putra dan Puspita (2019) yang memberikan kesimpulan adanya dampak secara simultan dari, kepercayaan dan persepsi risiko mengenai penggunaan, akan tetapi secara parsial persepsi risiko dinyatakan tidak berpengaruh terhadap penggunaan layanan. Hasil studi dari Fitriyah (2020) juga menyimpulkan jika persepsi risiko tidak berdampak mengenai penggunaan layanan. Perbedaan hasil penelitian Putra dan Puspita (2019) dengan teori perilaku konsumen diprediksi disebabkan oleh implementasi budaya organisasi yang juga dapat mempengaruhi kepuasan pengguna yang pada akhirnya berdampak pada perilaku nasabah dalam penggunaan layanan. Pernyataan itu sejalan dengan hasil studi Qamariah (2019) yang memberikan kesimpulan jika budaya organisasi berdampak terhadap penggunaan suatu layanan oleh konsumen.

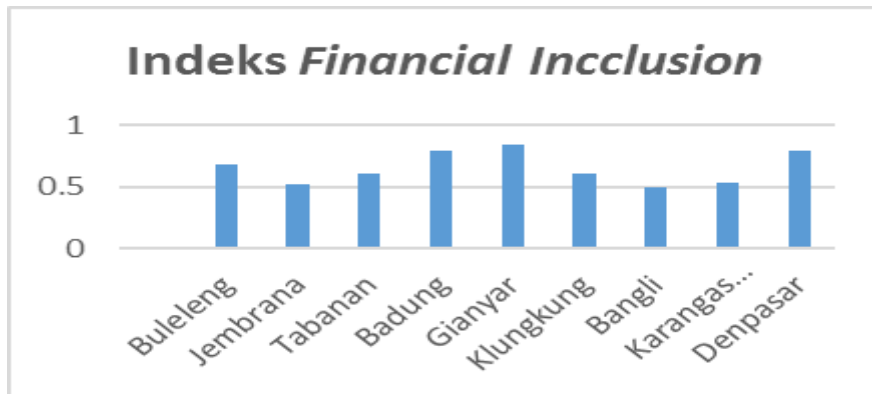
Berbagai unit bisnis di Bali termasuk LPD didalam menjalankan aktivitas operasionalnya juga tidak terlepas dari budaya lokal pada masyarakat Bali yakni *Tri Hita Karana (THK)*. Pernyataan ini juga didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan LPD ialah Lembaga

Perkreditan Desa milik desa adat yang berkedudukan di wewidangan desa adat, dan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang ada di Bali. Konsep *THK* ialah konsep nilai budaya lokal yang telah tumbuh, berkembang didalam tradisi masyarakat Bali tentang harmonisasi, dan bahkan saat ini sudah menjadi pedoman falsafah bisnis. Dipercaya jika dengan harmonisnya lingkungan di dalam LPD dengan pihak luarnya, niscaya LPD tersebut menjadi tenang dan damai, serta penuh dengan kebersamaan juga keharmonisan. Biasanya LPD di Bali cenderung mempunyai kultur organisasi yang cukup berbeda didalam melaksanakan konsep *THK*, alasanya karena LPD terletak pada tempat yang berbeda. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menguji kemampuan dari sinergitas antara layanan keuangan digital berbasis *E-Link* dengan *perceived risk management* dan budaya *THK* didalam mendorong *financial inclusion* masyarakat pedesaan, khususnya yang diimplementasikan oleh LPD yang ada di Bali. Melihat hasil studi dari Adriani dan Wiksuana (2018) ditemukan hasil bahwa dari semua kabupaten yang ada di Bali, Kabupaten Bangli menduduki tingkat inklusi paling rendah yaitu 50% seperti yang tertera pada Gambar 1 dan tabel 1 berikut.

Tabel 1. Indeks Inklusi Keuangan Kabupaten atau Kota Provinsi Bali

Kab/ Kota	X1 (Indeks Inklusi Perkotaan)	X2 (Indeks Inklusi Pedesaan)	X1+X2	IFI = (X1+X2)/2
Buleleng	0,71	0,65	1,37	0,68
Jembrana	0,72	0,32	1,04	0,52
Tabanan	1,00	0,22	1,23	0,61
Badung	1,24	0,33	1,57	0,79
Gianyar	1,31	0,38	1,68	0,84
Klungkung	0,93	0,3	1,23	0,61
Bangli	0,74	0,26	0,99	0,5
Karangasem	0,78	0,27	1,05	0,53
Denpasar	0,82	0,76	1,58	0,79

Sumber : Adriani dan Wiksuana (2018)



Gambar 1. Indeks Inklusi Keuangan Kabupaten atau Kota Provinsi Bali

Daya dukung budaya didalam meningkatkan *financial inclussion* telah terbukti melalui hasil penelitian Natalia, dkk (2020) yang menemukan bahwa *social capital* meliputi kepercayaan, norma dan relasi dapat membantu *financial literacy* dalam menciptakan inklusi keuangan yang lebih baik. Kesa (2019) juga mengungkapkan bahwa budaya merupakan faktor penentu sikap masyarakat dalam mengakses keuangan yang dapat berdampak pada *financial inclussion*.

Permasalahan yang nantinya akan diteliti pada studi ini yakni: 1) apakah penyediaan *E-Link service* berpengaruh pada *financial inclussion* masyarakat?, 2) apakah *perceived risk management* berpengaruh pada *financial inclussion* masyarakat?, dan 3) apakah implementasi *THK* pada LPD dapat mempengaruhi *financial inclussion* masyarakat?. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam riset ini pengujian faktor penentu *financial inclussion* ditinjau dari faktor internal dalam diri serta faktor eksternal yang mencangkup berbagai persepektif dalam tatanan kehidupan masyarakat yaitu persepektif teknologi di era digital, persepektif persepsi risiko, hingga pada faktor budaya. Analisa penelitian juga dilengkapi dengan analisa secara kuantitatif dan secara kualitatif untuk memperkuat hasil analisa.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangli dengan tujuan untuk mengkaji perkembangan *financial inclussion* masyarakat di kabupaten tersebut pada

tahun 2020, termasuk mengkaji sinergitas antara *E-Link* dengan *perceived risk management* dan budaya *THK* pada LPD yang terletak di Kabupaten Bangli.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji sinergi antara teori TAM dan teori perilaku konsumen dalam mendorong penggunaan suatu produk atau jasa. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas program layanan berbasis digital, manajemen risiko, dan implementasi kearifan lokal pada lembaga keuangan pedesaan dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat pedesaan yang masih cukup jauh dari masyarakat perkotaan. Hasil pada studi ini bisa digunakan sebagai dasar oleh manajemen LPD untuk melakukan perbaikan atau berbagai bentuk perbaikan menuju penyediaan layanan *E-Link* yang prima, penerapan Manajemen Risiko dan konsep *Tri Hita Karana* secara lebih optimal untuk mengoptimalkan penggunaan layanan LPD oleh nasabah.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Technology Acceptance Model (TAM)

Pada literatur sistem informasi manajemen, *Technology Acceptance Model (TAM)* dipandang sebagai satu dari sekian perilaku dalam pemenaat teknologi informasi. Dua faktor utama yakni *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan) dan *perceived usefulness* (persepsi kebermanfaatan) diasumsikan memiliki dampak pada penerimaan

individu atas teknologi informasi berdasarkan teori *TAM* (Davis, *et. al*, 1989). Persepsi kebermanfaatan dapat dikatakan sebagai persepsi atas tingkat kemampuan teknologi tersebut dalam membantu peningkatan kinerja, sedangkan persepsi kemudahan dapat dikatakan sebagai persepsi atas tingkat kepercayaan seseorang bilamana menggunakan sebuah sistem tertentu bisa membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Model *TAM* ialah sebuah konsep yang sering dipakai, oleh kebanyakan besar studi karena tersusun dari teori yang sangat kuat mendukung bahwa model *TAM* ialah konsep yang baik, dan *TAM* ialah konsep simpel dan valid sehingga dikatakan sebagai model *parsimony*.

Teori *TAM* merupakan hasil pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* yaitu ialah semua konsep yang berdasar pada sebuah alasan dimana reaksi dan persepsi individu mengenai sebuah hal bisa memastikan sikap dan juga perilaku orang tersebut. Maka dari itu, *TAM* banyak digunakan guna memperkirakan tingkat akseptasi pemakai dan pemakaian pemakaian yang berdasar pada kemudahan dalam penggunaan teknologi informasi. Implikasi akseptasi dapat dipelajari dengan menguji dampaknya kepada pemakai individual. *TAM* ialah teori psikologis yang dipergunakan untuk menjelaskan tindakan pemakai teknologi informasi dengan kepercayaan (*belief*), sikap (*attitude*), minat (*intention*), dan hubungan perilaku pengguna (*user behavior relationship*) sebagai elemen penjelasnya.

Teori Perilaku Konsumen

Kebiasaan konsumen merupakan suatu alur yang dilakukan oleh konsumen dalam memilih, membeli, memakai, kemudian mengevaluasi, dan menghabiskan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya (Kusumawati, 2020). Perilaku konsumen ialah pergerakan diantara pengaruh dan kesadaran, perilaku,

dan lingkungan tempat dimana manusia melaksanakan pertukaran bagian kehidupan (Pater and Olson, 2013).

Kotler and Armstrong (2010) menyatakan perilaku pembelian konsumen dipengaruhi dari unsur-unsur budaya, sosial, psikologi dan pribadi. Unsur bisa digolongkan menjadi budaya, sub budaya dan kelas sosial. Unsur budaya ialah sebab yang mendasar dari tindakan seseorang. Budaya ialah gabungan nilai-nilai yang mendasar, persepsi, keinginan dan tingkah laku yang didapat individu dari masyarakat maupun keluarga. Sub budaya seperti agama, kebangsaan, kelompok, ras atau wilayah tempat tinggal. Unsur social seperti keluarga, kelompok juga sangat mempengaruhi tindakan konsumen.

Psikologi yang membentuk perilaku konsumen dalam mengambil sikap dalam pembelian erat kaitannya dengan motivasi, persepsi, pengetahuan. Sedangkan karakteristik pribadi yang juga sangat mempengaruhi keputusan membeli erat kaitannya dengan usia dan tahapan daur kehidupan, situasi ekonomi, gaya dalm hidup, kepribadian, konsep diri, dan pekerjaan.

Financial Inclusion

Inklusi keuangan (*financial inclusion*) memiliki dua kata yakni inklusi dan keuangan. Inklusi umumnya diartikan sebagai memasukkan, sedangkan keuangan diartikan sebagai hal-hal yang menyangkut tentang uang. Inklusi keuangan ialah meningkatnya kesempatan dan keikutsertaan masyarakat untuk mengakses keuangan yang khususnya pada masyarakat *unbanked* (Abubakar dan Handayani, 2019). *Financial inclusion* juga diartikan sebagai hak semua orang untuk masuk dan menerima layanan penuh dari pihak lembaga keuangan dengan tepat waktu, terjangkau, informatif, dan penuh penghormatan (Septiyani, 2019). Tekanan inklusi keuangan ialah sebuah bentuk didalamnya layanan keuangan untuk masyarakat agar memanfaatkan produk

jasa keuangan yakni seperti transfer dan penyimpanan dana dengan aman, mengajukan kredit dan asuransi, dan juga transaksi lainnya. Seperti yang terjadi di Cina, tingkat inklusi keuangan menjadi tinggi ketika sebagian besar masyarakat memiliki rekening bank dan menggunakan rekening bank untuk melakukan transaksi keuangan (Fungacova and Weill, 2015). Bank sentral di Indonesia yakni BI memiliki program keuangan inklusif yang menyatu dengan teknologi keuangan dengan besar harapan meningkatkan penggunaan layanan perbankan oleh masyarakat (Bank Indonesia, 2019). Inklusi keuangan sebagai sarana kunci penurunan kemiskinan dikarenakan dapat melayani masyarakat yang belum terjangkau untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Inklusi keuangan memberikan seseorang untuk menyimpan dana dan juga meminjam dana untuk perluasan bisnis. Terdapat tiga indikator dalam menilai penggunaan layanan keuangan formal oleh individu yaitu : 1) memegang setidaknya satu produk keuangan, 2) menyimpan uang dalam bentuk tabungan, dan 3) memiliki pinjaman di lembaga keuangan formal (CCmara and Tuesta, 2015). Rencana nasional keuangan inklusif, strategi keuangan inklusif dipaparkan kedalam empat pilar yakni edukasi keuangan, pelayanan keuangan pada sektor pemerintah, fasilitas intermediasi dan distribusi serta perlindungan konsumen (Septiyani, 2019).

Edukasi keuangan ialah rencana peningkatan kapabilitas didalam pengelolaan keuangan yang diawali dengan pemahaman juga kesadaran masyarakat. Cakupan edukasi keuangan meliputi: a) pemberian pemahaman dan kesadaran tentang berbagai produk dan jasa keuangan yang ada; b) pemahaman dan kesadaran akan resiko dari produk jasa keuangan; c) perlindungan nasabah. Peningkatan transparansi untuk transaksi nontunai ialah fungsi dari pilar layanan

keuangan pada sector pemerintah. Pilar fasilitas intermediasi dan distribusi mencakup: a) memfasilitasi pertemuan antara masyarakat produktif dengan lembaga keuangan untuk menghindari asimetris informasi, b) meningkatkan skala usaha dengan mengadakan kerjasama, dan c) eksplorasi kemungkinan perkembangan produk, jasa dan saluran distribusi, inovatif dimana tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Pilar perlindungan konsumen memiliki tujuan memberikan rasa aman masyarakat dalam berurusan dengan lembaga keuangan dan memastikan agar lembaga keuangan melaksanakan prinsip perlindungan konsumen yakni antara lain keterbukaan, penerimaan perilaku adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian permasalahan konsumen secara sederhana, biaya terjangkau, dan cepat.

Layanan Berbasis Digital (*E-Link*)

E-Link service merupakan layanan keuangan yang berbasis keagenan yang diperuntukkan untuk memberikan layanan keuangan daring kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat pedesaan yang dapat diakses selama 24 jam melalui aplikasi di ponsel pintar (Melanda, 2019). Dengan adanya layanan *E-Link* melalui para agen perbankan, dari lembaga perbankan sendiri sudah berusaha untuk memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi. Agen-agen perbankan yang terhubung dalam *E-Link* dapat menyelenggarakan layanan keuangan berbasis digital yang dapat diakses melalui *m-banking* ataupun *e-banking* seperti layanan yang diberikan oleh perbankan. Layanan *m-banking* ialah layanan jarak jauh agar nasabah tidak perlu lagi dating ke bank. Fasilitas yang disediakan pada *mobile banking* ataupun *internet banking* sama seperti ATM yaitu dapat melakukan pemindahan dana, mengecek mutasi rekening, mengecek saldo rekening, dan melakukan berbagai bentuk pembayaran

seperti pembayaran listrik, pembayaran cicilan kartu kredit, telepon, handphone, asuransi, dan pembelian pulsa.

Perceived Risk Management

Perceived risk management didefinisikan pemikiran nasabah akan adanya ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan resiko yang nantinya dihadapi nasabah dalam proses penggunaan produk atau jasa perusahaan (Chin and Zainal, 2015). Persepsi risiko diartikan sebagai pemikiran konsumen akan sebuah ketidakpastian dan resiko yang mungkin nanti akan diterima dari pembelian sebuah produk (Prabowo, 2019). Beberapa komponen dari faktor persepsi risiko antara lain: 1) risiko keuangan yang berkaitan dengan risiko layanan yang dibeli mungkin tidak akan mencapai keuntungan moneter terbaik untuk konsumen atau pengguna, 2) risiko psikologis yang berkaitan dengan risiko pemilihan atau kinerja produsen akan memiliki efek negatif pada konsumen, 3) risiko *fraud* yang berkaitan dengan risiko kecurangan yang dilakukan oleh pihak produsen yang dapat berdampak kerugian bagi konsumen, 4) risiko privasi yang berkaitan dengan risiko penyebaran informasi pribadi konsumen yang bersifat rahasia, dan 5) risiko informasi yaitu berkaitan dengan risiko atas informasi yang tidak relevan dan tidak akurat.

Tri Hita Karana (THK)

THK ialah tiga sebab timbulnya kebahagiaan. Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan tersebut diantaranya Parahyangan, Pawongan dan Palemahan. Parahyangan ialah hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai umat yang beragama berdasarkan akan kerangka *theology* yang diyakini oleh seseorang maka kita pertama kali harus menciptakan hubungan yang baik dengan Sang Pencipta dengan cara bekerja keras dengan percaya pada kemampuan yang dimiliki. Hubungan harmonis antar sesama manusia disebut sebagai pawongan. Antar umat beragama

agar menjaga komunikasi dengan mengadakan kegiatan Sima Krama atau silaturahmi. Manusia selalu hidup berdampingan maka dari itu kegiatan ini penting dan wajib dilaksanakan. Maka dari itu tali persaudaraan harus tetap terjalin secara harmonis. Berdasarkan konsep *THK*, implementasi dari bagian hubungan manusia dengan manusia (*Pawongan*) dikaitkan dengan komunikasi kelompok di mana komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang tidak terlepas dari aktivitas sehari-hari yang terjadi pada suatu kelompok untuk mendapatkan tujuan yang dikehendaki seperti pemecahan masalah atau informasi guna peningkatan karakteristik individu (Daryanto dan Muljo, 2016). Sedangkan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya disebut palemahan. Ajaran ini memberikan penekanan terhadap umat manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk mewujudkan keharmonisan lingkungan dan ekosistem yang seimbang (Subagia, 2016).

E-Link Service dan Financial Inclusion

E-Link service merupakan salah satu bentuk layanan keuangan berbasis digital yang diinovasikan dengan peningkatan pemanfaatan data nasabah untuk melayani nasabah agar lebih cepat, mudah, dan juga sesuai dengan kebutuhan nasabah juga dapat dilakukan mandiri oleh nasabah, tetapi tetap memperhatikan keamanan (POJK No. 12, 2018). *E-Link service* merupakan layanan keuangan yang berbasis keagenan yang diperuntukkan untuk memberikan layanan keuangan daring kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat pedesaan yang dapat diakses selama 24 jam melalui aplikasi di ponsel pintar (Melanda, 2019).

Layanan keuangan berbasis digital seperti pembayaran, transfer, dan informasi saldo yang dapat diakses melalui *m-banking* ataupun *e-banking* layaknya jasa layanan yang disuguhkan oleh perbankan dapat diselenggarakan oleh agen-agen perbankan

yang terhubung dalam *E-Link* seperti LPD. Kebermanfaatan layanan tersebut didalam membantu mempermudah transaksi para nasabah dengan layanan 24 jam tentu akan mendorong keinginan nasabah atau masyarakat untuk menggunakan jasa layanan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa *financial inclusion* tercapai. *Financial inclusion* ialah peningkatan pemberian kesempatan dan keikutsertaan masyarakat untuk mengunjungi layanan keuangan khususnya pada masyarakat *unbanked* (Abubakar dan Handayani, 2019).

Persis dengan yang dipaparkan dalam teori TAM dimana faktor yang dapat mendorong sikap penggunaan teknologi informasi oleh pengguna adalah faktor persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived easy of use*) didalam pemakaian teknologi informasi tersebut (Eltin, 2019). Persepsi kebermanfaatan merupakan tingkat keyakinan seseorang jika memakai sistem tertentu akan meningkatkan ketercapaian tujuan kerja, sedangkan persepsi kemudahan berpedoman pada tingkatan kepercayaan individu dimana penggunaan teknologi tertentu akan memudahkan pekerjaan. Pernyataan teori tersebut juga telah didukung hasil studi dari Nurfalah dan Rusydiana (2019) yang memberikan bukti bahwa aplikasi *connected* tersebut dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan. Nurfalah dan Rusydiana (2019) menyatakan bahwa solusi inovasi digital sangat membantu peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia melalui pembuatan aplikasi "*Connected, One Stop Solution*". Berpedoman pada pengembangan teoritis dan studi oleh peneliti terdahulu maka studi ini merumuskan hipotesis:

H1: *E-Link service* berpengaruh positif pada *financial inclusion* masyarakat.

Perceived Risk Management dan Financial Inclusion

Perceived risk management diartikan sebagai pemahaman nasabah mengenai ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan konsekuensi negatif yang dihadapi nasabah dalam proses penggunaan produk atau jasa layanan suatu perusahaan (Chin and Zainal, 2015). LPD yang mampu mengontrol dan bahkan menghindari berbagai bentuk risiko dan konsekuensi negatif bagi para nasabahnya sebagai akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan oleh LPD, maka tentu saja hal ini akan berpengaruh pada rasa percaya nasabah didalam mengkonsumsi jasa pelayanan yang diberikan oleh LPD dan akan sangat mempengaruhi persepsi nasabah atau masyarakat terhadap tata pengelolaan risiko yang telah dijalankan dengan oleh manajemen LPD. Kepercayaan ini yang akan mendorong keinginan nasabah atau masyarakat untuk menggunakan jasa layanan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa *financial inclusion* tercapai.

Kotler and Armstrong (2010) menyatakan keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh unsur budaya, sosial, pribadi dan psikologi. Unsur pribadi berkaitan dengan tingkat pendidikan dan penghasilan (Zins and Weill, 2016). Unsur psikologi yang membentuk perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian berkaitan pada motivasi, persepsi, pengetahuan dan sikap (Anderson, 2017). Persepsi atas pengelolaan risiko yang dilakukan oleh manajemen LPD juga menjadi penentu kenyamanan nasabah didalam menggunakan berbagai jenis layanan yang disediakan oleh LPD. Hasil penelitian (Putra dan Puspita, 2019) juga menyatakan bahwa secara simultan adanya dampak dari persepsi risiko, dan kepercayaan terhadap penggunaan *e-banking* yang merupakan salah satu jenis jasa layanan yang ditawarkan oleh perbankan. Berpedoman pada pengembangan teoritis dan dan hasil dari penelitian terdahulu maka studi ini merumuskan hipotesis :

H2: *Perceived risk management* berpengaruh positif pada *financial inclusion* masyarakat.

Tri Hita Karana* dan *Financial Inclusion

Penggunaan layanan oleh masyarakat juga tidak terlepas dari budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat sekitar. Budaya lokal *THK* yang terdiri dari konsep *Parahyangan*, *Palemahan* dan *Pawongan* yang juga menjadi landasan organisasi LPD merupakan konsep yang dapat mendekatkan organisasi dengan para nasabahnya.

Dalam konsep *Parahyangan*, tata kelola LPD harus memperhatikan adanya eksistensi dari perwujudan bangunan suci. Di tempat suci komunitas manusia dapat melakukan sujudnya kepada Tuhan. Dengan implementasi ini diharapkan setiap karyawan LPD akan mampu mengimplementasikan ajaran agama melalui pemikiran yang suci, perbuatan maupun perkataan yang sopan dan baik. Sujud bakti kepada Tuhan juga akan membawa umat manusia menuju pikiran yang suci, dan ketulusan dalam memberikan pelayanan dengan penuh itikad baik kepada para konsumen, sehingga masyarakat selaku nasabah akan merasa nyaman didalam melakukan transaksi di LPD.

Dalam aspek *Pawongan*, pengelola LPD harus menghormati hak-hak individu dan menilai setiap individu itu setara, baik itu bagi karyawan ataupun bagi masyarakat selaku konsumen LPD. Melalui implementasi ini, diharapkan akan pemererat rasa kebersamaan diantara karyawan dan juga semakin menciptakan loyalitas nasabah kepada LPD. Dan dalam aspek *Palemahan*, LPD juga seharusnya memperhatikan lingkungan alam melalui wujud menjaga kebersihan lingkungan kerja dan sekitarnya sehingga mampu menciptakan suasana yang nyaman dan sehat bagi para karyawan dan bagi para nasabah yang berkunjung.

Kotler and Armstrong (2010) menyatakan perilaku pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh unsur budaya, maka dari itu budaya organisasi berbasis *THK* yang mampu bersinergi dengan budaya masyarakat sekitar tentunya akan semakin mendekatkan manajemen LPD dengan para nasabahnya. Hubungan kedekatan ini yang akan semakin menumbuhkan rasa loyalitas dari para nasabah atau masyarakat untuk mengakses jasa layanan yang diberikan oleh LPD.

Daya dukung budaya didalam meningkatkan *financial inclusion* telah terbukti melalui hasil penelitian Natalia, dkk (2020) yang menemukan bahwa *social capital* meliputi kepercayaan, norma dan relasi dapat membantu *financial literacy* dalam menciptakan inklusi keuangan yang lebih baik. Kesa (2019) juga mengungkapkan bahwa budaya merupakan faktor penentu sikap masyarakat dalam mengakses keuangan yang dapat berdampak pada *financial inclusion*. Berpedoman pada pengembangan teoritis dan hasil penelitian terdahulu jadi studi ini merumuskan hipotesis:

H3 : *Tri Hita Karana* berpengaruh positif pada *financial inclusion* masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah merupakan penelitian kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif atau yang sering dikenal dengan *mixed methods*. *Mixed methods* ialah teknik yang mengadopsi lebih dari satu teknik riset guna memberikan penjelasan yang lebih luas terhadap masalah yang diteliti. Model *mixed method* yang dipilih ialah *sequential explanatory* yakni tekni penelitian kombinasi dimana itu menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, dimana penelitian kuantitatif dahulu baru selanjutnya kualitatif (Sugiyono, 2018). Sumber data pada studi ini ialah data primer yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner dan juga hasil dari wawancara. Model

wawancara yang dilakukan adalah *direct interview*.

Populasi penelitian adalah seluruh nasabah LPD di Bangli yang menggunakan *E-Link* yaitu sejumlah 997 orang. Dari total 159 LPD yang tersebar di empat Kecamatan Kabupaten Bangli, hanya tujuh LPD yang menggunakan program *E-Link* yaitu LPD Ulian, LPD Palak Tiyang, LPD Pengotan, LPD Metra, LPD Blacan, LPD Kebob, dan LPD Bayung Gede. Pemilihan jumlah anggota sampel yang dipakai pada studi ini berdasarkan pada metode sampel hasil pengembangan dari Isaac dan Michael (Sugiyono, 2017). Berdasarkan pada perhitungan penentuan banyaknya sampel pada tingkat kesalahan 5%, jadi banyaknya sampel yang digunakan pada studi ini sejumlah 258 orang yang berasal dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli. Pemilihan anggota sampel yang akan dijadikan subjek penelitian dilaksanakan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria merupakan nasabah LPD yang menggunakan fasilitas *E-Link service*, dengan rata-rata transaksi minimal 15 kali dalam setahun menggunakan fasilitas *E-Link service*. Kriteria ini digunakan untuk mendapatkan anggota sampel yang telah memahami tentang fasilitas *E-Link service* sehingga tujuan penelitian dapat tercapai secara maksimal.

Pengumpulan data pada pendekatan kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada para nasabah LPD. Sedangkan pengumpulan data pada pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dengan para nasabah dan kepada para pengurus serta karyawan LPD.

E-Link service merupakan salah satu bentuk layanan keuangan berbasis digital yang terus dikembangkan melalui optimalisasi pemanfaatan data nasabah guna meningkatkan pelayanan terhadap nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan juga bisa dilakukan secara mandiri seluruhnya oleh nasabah

tetapi tetap memperhatikan aspek keamanan (POJK No. 12, 2018). *E-Link service* merupakan layanan keuangan yang berbasis keagenan yang diperuntukkan untuk memberikan layanan keuangan daring kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat pedesaan yang dapat diakses selama 24 jam melalui aplikasi di ponsel pintar (Melanda, 2019). Indikator yang digunakan untuk mengukur *E-link service* antara lain pemahaman kebermanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived easy of use*). Data terkait *E-link service* diperoleh melalui pemberian kuesioner kepada para nasabah yang terdiri dari beberapa poin pernyataan yang mana diambil dari sebuah penelitian Wildan (2019) dan Anisa (2016) yang disesuaikan dengan topik penelitian. Kuesioner diukur dengan memanfaatkan suatu skala yang bernama *Likert 4* poin, dimana sangat tidak setuju memiliki poin 1, tidak setuju memiliki poin 2, setuju memiliki poin 3 serta sangat setuju memiliki poin 4. Informasi terkait *E-link service* kemudian diperdalam melalui wawancara dengan pihak LPD.

Perceived risk management diartikan sebagai suatu persepsi yang dimiliki nasabah tentang ketidakpastian, ketidaknyamanan, serta suatu konsekuensi yang sifatnya negatif yang mana kemungkinan dihadapi oleh nasabah dalam proses penggunaan produk atau jasa layanan suatu perusahaan (Chin and Zainal, 2015). *Perceived risk management* mengadopsi penelitian Rendra (2011) dengan mengukur item pernyataan yang disesuaikan dengan topik penelitian. Kuesioner diukur dengan memanfaatkan suatu skala yang bernama *Likert 4* poin, dimana sangat tidak setuju memiliki poin 1, tidak setuju memiliki poin 2, setuju memiliki poin 3 serta sangat setuju memiliki poin 4. Indikator yang digunakan untuk mengukur *perceived risk management* antara lain *financial risk*, *psychological risk*, *privacy risk*, *fraud risk*, *product risk*, dan *information risk*.

THK adalah tiga penyebab terciptanya kebahagiaan diantaranya: a) Harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yakni disebut *parahyangan*, b) Harmonisasi hubungan antar sesama manusia yang disebut *pawongan*, dan c) harmonisasi hubungan antara manusia dengan lingkungan disebut *palemahan*. *THK* diukur dengan mengadopsi penelitian dari Nopiyani dkk. (2019). Kuesioner diukur dengan memanfaatkan suatu skala yang bernama *Likert* 4 poin, dimana sangat tidak setuju memiliki poin 1, tidak setuju memiliki poin 2, setuju memiliki poin 3 serta sangat setuju memiliki poin 4.

Financial inclusion juga diberikan definisi dimana merupakan suatu hak yang mana dimiliki oleh setiap orang dalam mengakses serta mendapatkan layanan secara penuh dari seluruh lembaga keuangan dengan baik dan selalu mendapatkan kehormatan secara penuh terhadap harkat serta martabat orang tersebut (Septiyani, 2019).

Financial inclusion diukur melalui item pernyataan yang diadopsi dari penelitian Septiyani (2019). Kuesioner diukur dengan memanfaatkan suatu skala yang bernama *Likert* 4 poin, dimana sangat tidak setuju memiliki poin 1, tidak setuju memiliki poin 2, setuju memiliki poin 3 serta sangat setuju memiliki poin 4. Indikator untuk mengukur *financial inclusion* yang meliputi edukasi keuangan, intermediasi dan saluran distribusi, layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen.

Analisis data pada pendekatan kuantitatif dilakukan menggunakan model regresi linier berganda. Data dianalisis dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 25. Persamaan model regresi sederhana adalah sebagai berikut.

$$FI = \alpha + \beta_1 ES + \beta_2 PRM + \beta_3 THK + \varepsilon$$

Keterangan:

PKI : *Financial Inclusion*

α : Konstanta

β_1 : Koefisien Regresi Variabel *E-Link Service*

β_2 : Koefisien Regresi Variabel *Perceived Risk Management*

β_3 : Koefisien Regresi Variabel *Tri Hita Karana*

ES : *E-Link Service*

PRM : *Perceived Risk Management*

THK : *Tri Hita Karana*

ε : *Error Term*

Menurut Ghazali (2013: 97), *goodness of fit* dilaksanakan guna mengetahui ketepatan dari fungsi regresi sampel didalammenalar skor actua, dan secara statistic bisa diukur dengan uji F dan nilai koefisien determinasi (R^2). Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan pengujian pada nilai statistik t (uji signifikan parameter individual). Analisis kualitatif kemudian dilakukan atas data yang diperoleh melalui tahapan wawancara yang sebelumnya diuji validitas data triangulasi yang melibatkan : 1) alur reduksi data analisis yang mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data hingga berupa kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi, 2) penyajian data sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dan 3) menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kumpulan data studi atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Demografis partisipan penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Demografis Partisipan

Jenis Kelamin	Usia			Pendidikan Terakhir			Pekerjaan		
	10-24	25-39	40-54	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	PNS	Swasta	Petani
Perempuan	19	49	58	58	45	23	24	37	65
Laki-Laki	16	53	63	61	53	18	18	45	69
Total	35	102	121	119	98	41	42	82	134

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2. dari total 258 partisipan, terdapat 35 partisipan dengan usia 10-24 tahun yang terdiri dari 19 partisipan berjenis kelamin perempuan dan 16 partisipan berjenis kelamin laki-laki. Partisipan dengan usia 25-39 tahun terdiri dari 49 partisipan dengan jenis kelamin perempuan dan 53 partisipan dengan jenis kelamin laki-laki, sedangkan 121 partisipan berusia 40-54 tahun yang terdiri dari 58 partisipan perempuan dan 63 partisipan laki-laki.

Hasil demografis partisipan berdasarkan pendidikan terakhir diperoleh 3 hasil, sebanyak 119 partisipan dengan pendidikan terakhir SMP yang terdiri dari 58 partisipan perempuan dan 61 partisipan laki-laki. Sedangkan partisipan dengan pendidikan terakhir SMA terdiri dari 45 partisipan perempuan dan 53 partisipan laki-laki, serta partisipan yang menempuh pendidikan terakhir hingga perguruan

tinggi terdiri dari 23 partisipan perempuan dan 18 partisipan laki-laki. Jika digolongkan berdasarkan pekerjaan dari 258 partisipan, untuk partisipan yang memiliki pekerjaan sebagai PNS sebanyak 42 orang yang terdiri dari 24 partisipan perempuan dan 18 partisipan laki-laki. Sedangkan partisipan dengan pekerjaan swasta sejumlah 82 partisipan dengan 37 partisipan perempuan dan 45 partisipan laki-laki. Sedangkan partisipan terbanyak yaitu dengan 134 partisipan bekerja sebagai petani dengan 65 partisipan perempuan dan 69 partisipan berjenis kelamin laki-laki.

Analisis deskriptif juga dilaksanakan guna memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yaitu *E-Link Service*, *Perceived Risk Management*, *Tri Hita Karana*, dan *Financial Inclusion*. Hasil pengolahan data dengan menggunakan statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Link Service	258	15	20	17.89	1.862
Perceived Risk Management	258	21	31	26.26	2.539
Tri Hita Karana	258	19	24	21.03	1.968
Financial Inclusion	258	20	28	24.03	2.729
Valid N (listwise)	258				

Sumber : Data diolah, 2020

Hasil dari dilakukannya analisis deskriptif tercantum pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa skor rerata *E-Link Service* adalah sebesar 17,89 dengan skor terendah sebesar 15 dan skor tertinggi sebesar 20. Nilai simpangan baku sebanyak 1,862 yang skornya lebih rendah dari skor rerata sebesar 17,89 menunjukkan bahwa penilaian terhadap *E-Link Service* pada

LPD memiliki fluktuasi yang kecil. Nilai rata-rata adalah *Perceived Risk Management* adalah sebesar 26,26 dengan skor terendah sebesar 21 dan skor tertinggi sebesar 31. Nilai simpangan baku sejumlah 2,539 yang skornya dibawah dari skor rerata sebanyak 26,26 menunjukkan bahwa penilaian terhadap *Perceived Risk Management* pada LPD memiliki fluktuasi

yang kecil. Demikian pula untuk nilai simpangan baku *Tri Hita Karana* sebesar 1,968 memiliki skor yang lebih rendah dari skor rerata sebesar 21,03 sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian terhadap *Tri Hita Karana* pada LPD memiliki fluktuasi yang kecil. Nilai minimum dan nilai maksimum untuk penilaian *Tri Hita Karana* adalah sebesar 19 dan 24. Nilai simpangan baku *Financial Inclusion* sebesar 2,729 mempunyai skor dibawah dari skor rerata sebesar 24,03 sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian terhadap *Financial Inclusion* pada LPD memiliki fluktuasi yang kecil. Skor terendah dan skor tertinggi untuk penilaian *Financial Inclusion* adalah sebesar 20 dan 28.

Data pengamatan tentang *E-Link Service*, *Perceived Risk Management*, *Tri Hita Karana*, dan *Financial Inclusion* yang telah disusun selanjutnya akan diklasifikasikan kedalam tiga kategori yakni kategori tinggi, kategori sedang, dan kategori rendah untuk melihat tingkat *E-Link Service*, *Perceived Risk Management*, *Tri Hita Karana*, dan *Financial Inclusion* LPD berdasarkan penilaian nasabah. Langkah yang dilakukan adalah membagi data kedalam tiga kategori seperti rumus pada Tabel 4.

Tabel 4. Rumus Kategorisasi Data

Klasifikasi	Interval
Tinggi	$X > M + 1 \text{ SD}$
Sedang	$M - 1 \text{ SD} \leq X \leq M + 1 \text{ SD}$
Rendah	$X < M - 1 \text{ SD}$

Sumber: Statistika (Riwidikdo, 2009)

Hasil dari pengelompokkan data *E-Link Service* berdasarkan perhitungan rumus pada Tabel 4 disajikan pada Tabel 4. Variabel *E-Link Service* memiliki rentang $X > 19$ untuk kategori tinggi, $16 \leq X \leq 19$ untuk kategori sedang, dan $X < 16$ untuk kategori rendah. Berdasarkan kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa 31,78% penilaian nasabah terhadap kebermanfaatan *E-Link Service* terkategori tinggi, 41,86% dengan kategori sedang,

dan 26,36% dengan kategori rendah. Hasil itu memperlihatkan umumnya nasabah memberikan penilaian terhadap kebermanfaatan *E-Link Service* yang disediakan oleh LPD berada pada kategori sedang.

Tabel 5. Hasil Kategorisasi Data *E-Link Service*

Kategori	Skor	Jumlah	Persentase
Tinggi	> 19	82	31,78%
Sedang	$16 - 19$	108	41,86%
Rendah	< 16	68	26,36%
Total		258	100%

Sumber : Data yang diolah, 2020

Tabel 6. Hasil Kategorisasi Data *Perceived Risk Management*

Kategori	Skor	Jumlah	Persentase
Tinggi	> 29	66	25,58%
Sedang	$24 - 29$	129	50%
Rendah	< 24	63	24,42%
Total		258	100%

Sumber: Data yang diolah, 2020

Hasil kategorisasi data *Perceived Risk Management* berdasarkan perhitungan rumus pada Tabel 4 disajikan pada Tabel 6. Variabel *Perceived Risk Management* memiliki rentang $X > 29$ untuk kategori tinggi, $24 \leq X \leq 29$ untuk kategori sedang, dan $X < 24$ untuk kategori rendah. Berdasarkan kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa 25,58% *Perceived Risk Management* nasabah pada LPD terkategori tinggi, 50% dengan kategori sedang, dan 24,42% dengan kategori rendah. Hasil itu memperlihatkan pada umumnya *Perceived Risk Management* nasabah pada LPD berada pada kategori sedang.

Hasil kategorisasi data *Tri Hita Karana* dan *Financial Inclusion* berdasarkan perhitungan rumus pada Tabel 4 disajikan pada Tabel 7 dan Tabel 8. Variabel *Tri Hita Karana* memiliki rentang $X > 23$ untuk kategori tinggi, $20 \leq X \leq 23$ untuk kategori sedang, dan $X < 20$ untuk kategori rendah. Berdasarkan kategorisasi

tersebut menunjukkan bahwa 28,68% penilaian nasabah terhadap implementasi *Tri Hita Karana* pada LPD terkategori tinggi, 46,13% dengan kategori sedang, dan 25,19% dengan kategori rendah. Hasil memperlihatkan jika umumnya nasabah memberikan penilaian terhadap terhadap implementasi *Tri Hita Karana* pada LPD pada kategori sedang.

Tabel 7. Kategorisasi Data Tri Hita Karana

Kategori	Skor	Jumlah	Persentase
Tinggi	> 23	74	28,68%
Sedang	20 – 23	119	46,13%
Rendah	< 20	65	25,19%
Total		258	100%

Sumber: Data yang diolah, 2020

Tabel 8. Kategorisasi Financial Inclusion

Kategori	Skor	Jumlah	Persentase
Tinggi	> 27	58	22,48%
Sedang	21 – 27	144	55,82%
Rendah	< 21	56	21,70%
Total		258	100%

Sumber: Data yang diolah, 2020

Variabel *Financial Inclusion* memiliki rentang $X > 27$ untuk kategori tinggi, $21 \leq X \leq 27$ untuk kategori sedang, dan $X < 21$ untuk kategori rendah. Berdasarkan kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa 22,48% *Financial Inclusion* masyarakat pedesaan terhadap jasa layanan LPD terkategori tinggi, 55,82% dengan kategori sedang, dan 21,70% dengan kategori rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum *Financial Inclusion*

Tabel 10. Hasil Uji Multikolonieritas

Model			Collinearity Statistics	
		Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.033		
	E-Link Service	.001	.554	1.804
	Perceived Risk Management	.211	.684	1.462
	Tri Hita Karana	.100	.605	1.654

Sumber: Data yang diolah, 2020

Hasil dari uji multikolonieritas tercantum pada Tabel 10. Hasil dari uji multikolonieritas memperlihatkan jika tidak terjadi sebuah gejala multikolonieritas. Skor *Centered VIF*

masyarakat pedesaan terhadap jasa layanan LPD terkategori sedang.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas residual dilaksanakan dengan memakai uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov* bisa dilihat pada Tabel 9. Tabel 9 menyatakan skor signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) berada pada nilai 0,184 artinya memiliki skor lebih tinggi dari taraf signifikansi 5% (0,05). Mengacu pada hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa residual memiliki distribusi yang normal.

Tabel 9. Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	258
Test Statistic	.073
Asymp. Sig. (2-tailed)	.184 ^c

Sumber: Data yang diolah, 2020

Hasil Uji Multikolonieritas

Pendeteksian terjadi atau tidak terjadinya gejala multikolonieritas di dalam sebuah model regresi dapat ditentukan dari *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai *cut off* dipakai guna memperlihatkan adanya multikolonieritas yakni nilai $VIF > 10$. Selain itu juga dapat dilihat dari nilai *tolerance* $> 0,10$.

semua variabel bebas ada dibawah skor 10 ($VIF < 10$) yaitu 1,804, 1,462, dan 1,654. Nilai *tolerance* juga berada di nilai $> 0,10$ yaitu 0,554, 0,684, dan 0,605.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model *glejser* digunakan untuk menguji terjadinya atau tidak sebuah tanda-tanda heterokedastisitas. Model ini dilaksanakan

melalui meregresikan skor *absolute* ei dengan variabel bebas. Jika tidak satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (nilai *absolute* ei), maka tidak ada heterokedastisitas.

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	T	Sig.
1 (Constant)	.181	.857
E-Link Service	2.120	.066
Perceived Risk Management	.207	.836
Tri Hita Karana	-1.159	.249

Sumber: Data yang diolah, 2020

Syarat skor signifikansi antar tiap variabel independen dengan *absolut residual* diatas dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas Hasil uji heterokedastisitas pada Tabel 11. Hasil dari uji *glejser* memperlihatkan tidak adanya gejala dari heterokedastisitas. Dibuktikan melalui skor signifikansi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap absolut residual tidak adanya signifikan pada skor alpha 5% (0,05) yakni berada pada posisi 0,066, 0,836, dan 0,249.

Hasil Analisis Regresi

Studi ini memakai analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh dari

variabel independen pada variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linear berganda ditampilkan pada Tabel 12, Tabel 13, dan Tabel 14.

Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan uji hipotesis adalah pengujian kelayakan pada model penelitian yang dilaksanakan melalui uji F (*F test*) untuk mengetahui dampak variabel independen mengenai variabel dependen. Hasil pada uji F memberikan skor yang signifikan maka dari itu model bisa dipergunakan untuk menguji hipotesis.

Tabel 12. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	F	Sig
1 Regression	16.524	.000b

Sumber: Data yang diolah, 2020

Tabel 12 memperlihatkan bahwa nilai F memiliki nilai signifikansi 0,00. SKor signifikansi hasil pada uji F berapa pada posisi dibawah tingkat signifikansi yang ditetapkan yakni $\alpha = 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu *E-Link Service*, *Perceived Risk Managemen* dan *Tri Hita Karana* secara berssama-sama berdampak signifikan pada *Financial Inclusion*. Nilai signifikansi hasil uji F (0,00) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang menjadi patokan ($\alpha = 0,05$) memperlihatkan model regresi dapat dinyatakan *fit* (layak)

sehingga pembuktian hipotesis dapat dijalankan ke step berikutnya.

Uji t parsial digunakan untuk menguji dampak variabel independen dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Seluruh variabel bebas mempunyai skor probabilitas signifikansi sebesar 0,01, 0,041 dan 0,047 yang berposisi dibawah skor signifikansi yang dijadikan acuan yakni $\alpha = 0,05$. Hasilnya ini memeperlihatkan bahawa variable bebas yaitu *E-Link Service*, *Perceived Risk Management* dan *Tri Hita Karana* melalui

terpisah berdampak signifikan terhadap *Financial Inclusion*.

E-Link Service mempunyai skor signifikansi $0,01 < 0,05$. Nilai koefisien regresi *E-Link Service* memiliki tanda positif yakni sebesar 0,530. Artinya hipotesis pertama disetujui, jadi *E-Link Service* berdampak positif pada *Financial Inclusion*. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa *Perceived Risk Management* berdampak positif pada *Financial Inclusion* dengan skor signifikansi $0,041 < 0,05$. Nilai koefisien regresi *Perceived Risk Management* memberi tanda positif sebesar 0,130. Artinya hipotesis kedua disetujui.

Perceived Risk Management berdampak positif pada *Financial Inclusion*. Variabel bebas yakni *Tri Hita Karana* mempunyai skor signifikansi $0,047 < 0,05$ dengan koefisien regresi positif sebesar 0,236. Artinya hipotesis ketiga diterima yang berarti bahwa *Tri Hita Karana* berdampak positif pada *Financial Inclusion*. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel *Financial Inclusion* dipengaruhi oleh *E-Link Service*, *Perceived Risk Management* dan *Tri Hita Karana* dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$FI = 5,971 + 0,530 ES + 0,130 PRM + 0,236 THK + \varepsilon$$

Tabel 13. Hasil Uji t Parital

Model	B	Unstandardized Coefficients	
		Std Error	Sig.
(Constant)	5.971	2.759	.033
E-Link Service	.530	.157	.001
Perceived Risk Management	.130	.104	.041
Tri Hita Karana	.236	.142	.047

Sumber: Data yang diolah, 2020

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.861a	.715	.696	2.291

Sumber: Data yang diolah, 2020

Hasil pengujian seperti yang disajikan pada Tabel 14 memberikan informasi jika nilai dari *Adjusted R-squared* sebesar 0,696 yang mana memberikan pengertian jika variabel bebas memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan varian terikat dengan besaran 69,9%, yang mana sisanya dengan besaran 30,4% memberikan penjelasan dari variabel lainnya yang tidak ikut dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Kualitatif

Data kualitatif diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan para petugas LPD yang mengoperasikan *E-Link Service*, serta wawancara dengan ketua LPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan

petugas LPD Bayung Gede yang mengoperasikan *E-Link Service* yaitu atas nama Made Sukarna diperoleh informasi bahwa :

“Layanan online sejak tahun 2020 yang kerjasama dengan Bank BPD dan Bank BRI ini sangat membantu masyarakat karena bisa untuk bayar pajak, listrik BPJS, dan samsat online. Semenjak ada layanan online ini nasabah semakin sering transaksi ke LPD dan bahkan masyarakat yang bukan nasabah juga semakin sering menggunakan layanan online ini, kesempatan untuk kami menawarkan mereka untuk menjadi nasabah LPD agar mendapat fasilitas biaya transaksi yang lebih murah daripada non nasabah.

Selanjutnya Bapak Made Sukarna juga memberikan informasi terkait dengan kendala ketika mengoperasikan layanan *E-Link Service* :

Kalau yang layanan online kerjasama dengan Bank BPD memang juga mudah digunakan seperti layanan online yang kerjasama dengan Bank BRI, hanya saja layanan online yang sistem dari Bank BPD pengamanannya lebih ketat sehingga yang berhak memberikan password token atau pin transaksi hanya 1 orang itu saja yaitu ketua LPD. Ketika pin tersebut sudah didapatkan dari Ketua LPD baru transaksi dapat dilanjutkan oleh user E-Link makanya perlu waktu yang lebih lama belum lagi jika ketua LPD sedang tidak di kantor.”

Bendahara LPD Pengotan yang diberikan kewenangan dalam monitoring *E-Link Service* atas nama I Nengah Cermen menyatakan bahwa :

“Kami di LPD punya layanan online namanya LPD digital yang baru berjalan tahun 2020 ini. Nasabah bisa beli listrik, bayar BPJS dan bahkan transfer ke rekening bank lain tapi kalau dari bank lain transfer ke rekening LPD belum bisa jadi pengirim harus transfer dulu ke rekening penampungan kita di bank baru kami tarikkan dan kirim ke rekening nasabah penerima dana di LPD. Namun terdapat kendala dalam pemanfaatannya secara optimal karena belum banyak masyarakat yang melek teknologi. Semakin banyak nasabah datang untuk minta bantuan petugas LPD dalam melakukan transaksi online, sejak layanan ini ada semua transaksi nasabah menjadi lebih cepat.”

Terkait dengan keamanan transaksi Ketua LPD Palak Tiyang Bapak I Wayan Warnama menyatakan bahwa :

“Sebelum ada sistem online yang terintegrasi seperti yang diterapkan mulai tahun 2020, kami sebagai pengurus inti LPD sangat sulit mengontrol kewan-

dana nasabah terutama yang dijemput bola oleh petugas lapangan. Pemberitaan yang paling sering yang menyebabkan LPD bermasalah kan kenakalan petugas lapangan yang tidak setorkan tabungan nasabah. Tapi semenjak ada layanan LPD digital petugas dipantau oleh sistem. Setiap ada nasabah nabung petugas lapangan harus input di alat sistem keliling yang dibawa agar keluar struk bukti transaksi sistem, nasabah juga akan menerima sms banking yang menyatakan transaksinya berhasil. Kami sudah menginformasikan kepada nasabah bahwa jika mereka nabung harus minta bukti print out sistem karena jika tidak mendapat struk maka ketidakamanan dana yang belum diinput petugas lapangan bukan menjadi tanggungjawab LPD tapi menjadi tanggungjawab nasabah sebagai konsekuensinya.”

Bapak I Wayan Kertayasa yang bertugas pada bagian admin yang juga diberi tugas untuk mengoperasikan layanan *E-Link* menyatakan bahwa keluhan nasabah terkait layanan *E-Link Service* hanya berkaitan dengan kegagalan transaksi dengan pernyataan sebagai berikut.

“Selama ini keluhan nasabah hanya karena kegagalan transaksi yang bisa sampai tiga empat kali akibat pembayaran pada tanggal mendekati deadline sehingga mungkin sistem di pusat eror karena diakses se-Indonesia, tapi kalau masalah kegagalan transaksi dan uang tidak kembali tidak pernah terjadi di LPD kami.”

Terkait dengan wujud filosofi *Tri Hita Karana* didalam program kegiatan LPD Kebon, Bapak I Dewa Made Putra Yasa sebagai ketua LPD Kebon menyatakan bahwa :

“Terdapat dana sosial yang memang disisihkan dari laba LPD yang diperuntukkan untuk kegiatan kemasyarakatan seperti pada saat pandemi covid 19 ini LPD Kebon memberi

sumbangan sembako, kami juga tiap tahunnya memberi beasiswa anak berprestasi tingkat SD dan SMP yang masuk 4 peringkat besar. Kami juga sering memberi sumbangan dalam upacara keagamaan seperti acara ngaben, acara odalan di Pura Desa."

Pernyataan dari para karyawan LPD tersebut terkonfirmasi oleh jawaban dari salah satu nasabah LPD Kebon atas nama I Gusti Ayu Arini yang menyatakan bahwa : *"Tiyang percaya transaksi di LPD karna maan bukti transaksi, pis aman sing taen ilang, aluh bertransaksi karena dibantu pegawe dan bisa transaksi mandiri, jani be ade layanan online keliling mekejang ngidaang uli mayah BPJS ajak transfer sing perlu joh-joh teke ke bank. Pelayanan LPD ramah, sube akrab ajak pegawene, tiyang semakin sai bertransaksi di LPD."*

Sebagai orang Bali yang tinggal di Pedesaan, I Gusti Ayu Arini memberikan tanggapan menggunakan Bahasa Bali. Makna pernyataan dari I Gusti Ayu Arini dalam Bahasa Indonesia adalah:

"Saya percaya transaksi di LPD karena dapat bukti transaksi, uang aman tidak pernah hilang, transaksi mudah karena dibantu oleh karyawan dan transaksi juga dapat dilakukan secara mandiri, sekarang ada pelayanan online keliling yang bisa melakukan transaksi pembayaran BPJS hingga melakukan transaksi transfer tidak perlu datang jauh-jauh ke bank. Pelayanan LPD ramah dan saya sudah akrab dengan karyawannya, saya semakin sering bertransaksi di LPD."

PEMBAHASAN

Pengaruh E-Link Service pada Financial Inclusion

Hasil regresi memberikan pengertian jika hipotesis yang pertama dinyatakan mampu diterima, dimana *E-Link Service* berpengaruh positif pada *Financial Inclusion* yang berarti bahwa semakin masyarakat merasakan kebermanfaatan *E-*

Link Service yang diberikan oleh pihak LPD maka semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan masyarakat yang berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi menggunakan akses layanan lembaga keuangan yaitu LPD.

E-Link merupakan salah satu bentuk layanan keuangan berbasis digital dilaksanakan perkembangan yang dilakukan dengan cara memberikan pemanfaatan yang optimal pada data yang dimiliki nasabah yang mana disini bermanfaat untuk memberikan pelayanan yang cepat, lebih mudah serta mampu disesuaikan dengan segala kebutuhan dari nasabah dan juga mampu diterapkan oleh nasabah dengan cara yang mandiri serta berpedoman pada aspek mengenai pengamanan (POJK No. 12, 2018). *E-Link service* merupakan layanan keuangan yang berbasis keagenan yang diperuntukkan untuk memberikan layanan keuangan daring kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat pedesaan yang dapat diakses selama 24 jam melalui aplikasi di ponsel pintar (Melanda, 2019). Melalui layanan *E-Link* nasabah dapat melakukan transaksi tanpa terbatas oleh waktu buka kantor LPD, cakupan transaksi yang mampu menjangkau berbagai wilayah tanpa batas, dan banyak fitur layanan yang disediakan seperti pembayaran listrik, pembayaran cicilan kartu kredit, telepon, *handphone*, asuransi, pembelian pulsa, transfer untuk keperluan usaha ataupun transfer untuk biaya sekolah anak dan transfer untuk keperluan lainnya, serta akses informasi saldo dan mutasi rekening yang paling sering diperlukan oleh masyarakat untuk membantu pemenuhan kebutuhan pribadi ataupun membantu aktivitas usaha. Layanan *E-Link* yang digunakan oleh LPD berdasarkan informasi hasil wawancara mendalam diantaranya adalah layanan *E-Link* yang bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) berupa internet banking BPD Bali, layanan *E-Link* yang bekerjasama dengan Bank Rakyat

Indonesia (BRI) dengan nama BRILink, *E-Link* yang bekerjasama dengan PT. Arindo Pratama yang dikenal dengan sistem Arindo, dan LPD digital yang dapat diakses secara mandiri melalui *smartphone* masing-masing nasabah. LPD digital merupakan layanan *E-Link* yang bekerjasama dengan PT. USSI Corp untuk membantu manajemen transaksi secara *online* di LPD. Kerjasama pemanfaatan LPD digital merupakan program inti BadanmKerjasama LembagaPerkreditan Desamm(BKSmLPD) se-Bali. Kombinasi penggunaan layanan *E-Link* di LPD dari berbagai sistem dilakukan oleh manajemen LPD dengan tujuan untuk memperluas kerjasama akses transaksi keuangan sehingga biaya transaksi juga dapat ditekan, termasuk juga untuk memperbanyak fitur layanan yang dapat disediakan oleh LPD karena pada satu sistem belum mampu mengakomodir seluruh jenis layanan transaksi seperti misalnya sistem Arindo belum dapat digunakan untuk pembayaran samsat online sehingga ini dilengkapi oleh fitur layanan dari internet banking Bank BPD Bali.

Berbagai bentuk kemudahan dan kebermanfaatan yang ditawarkan dalam layanan *E-Link* didalam mengakomodir keperluan transaksi keuangan masyarakat menyebabkan penyediaan layanan *E-Link* dapat menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan atau menggunakan jasa layanan ini apalagi ditengah situasi saat ini yaitu di masa pandemi COVID 19 yang lebih mengedepankan *less contact economy* tentunya akan semakin mendorong keinginan dan sikap masyarakat untuk menggunakan jasa layanan *E-Link* tidak terkecuali bagi masyarakat di pedesaan. Teori TAM juga menyatakan bahwa persepsi atas kebermanfaatan atau sering disebut dengan *perceived usefulness* serta persepsi atas kemudahan yang sering disebut dengan *perceived easy of use* dimana di dalam penerapan atas teknologi informasi akan

mendorong sikap pengguna terhadap pemakaian teknologi informasi. Semakin nasabah atau masyarakat percaya dan merasakan kebermanfaatan layanan yang ditawarkan oleh pihak LPD maka akan semakin sering nasabah tersebut menggunakan jasa layanan yang ditawarkan oleh LPD tersebut. Semakin terbukanya masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan seperti LPD maka pencapaian *financial inclusion* akan semakin optimal. Menurut Abubakar dan Handayani (2019), *financial inclusion* dapat diartikan sebagai sebuah proses kenaikan atas kesempatan serta masyarakat yang berpartisipasi di dalam melakukan akses mengenai keuangan yang mana khususnya diberikan pada masyarakat yang *unbanked*. *Financial inclusion* juga diberikan definisi dimana merupakan suatu hak yang mana dimiliki oleh setiap orang dalam mengakses serta mendapatkan layanan secara penuh dari seluruh lembaga keuangan dengan baik dan selalu mendapatkan kehormatan secara penuh terhadap harkat serta martabat orang tersebut (Sarma and Pais, 2011). Pelayanan *E-Link* tentunya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan jasa layanan lembaga keuangan dengan berbagai kemudahan dan kebermanfaatan yang akan mendorong peningkatan dalam partisipasi yang diikuti oleh masyarakat dalam melakukan akses di bidang keuangan yang mana secara khusus ditujukan pada masyarakat yang *unbanked*, oleh karena itu menunjukkan jika *financial inclusion* tercapai. Penelitian ini menghasilkan suatu hal yang sama dengan penelitian oleh Eltin (2019) yang mana ditemukan jika suatu kepercayaan, persepsi atas kegunaan serta kemudahan mampu memberikan efek yang sifatnya signifikan pada memiliki keniatan berperilaku dengan berpedoman pada *financial teknologi* sebagai salah satu sarana teknologi yang telah dikembangkan oleh BI untuk meningkatkan *Financial*

Inclusion. Nurfalah dan Rusydiana (2019) juga membuktikan bahwa aplikasi *connected* dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan.

Hasil analisis kuantitatif tersebut diperkuat oleh hasil analisis kualitatif yang menyatakan bahwa layanan *E-Link* memberikan berbagai bentuk kemudahan seperti layanan transfer dan pembayaran *online* yang dapat dilakukan secara mandiri ataupun dibantu oleh petugas LPD tanpa harus pergi jauh ke bank. Akan tetapi berdasarkan hasil kategorisasi data diperoleh hasil bahwa penilaian pengguna layanan terhadap kebermanfaatan *E-Link Service* yang disediakan oleh LPD berada pada kategori sedang yang disebabkan oleh implementasi pemanfaatan *E-Link Service* oleh LPD yang terkategori dalam tahap pengenalan karena baru terprogram dan diimplementasikan mulai tahun 2020 sehingga masih memerlukan edukasi-edukasi berkelanjutan yang optimal kepada masyarakat pedesaan yang masih awam akan teknologi.

Pengaruh *Perceived Risk Management* pada *Financial Inclusion*

Hipotesis yang kedua diterima berdasarkan hasil analisis regresi yang menyatakan bahwa *Perceived Risk Management* berpengaruh positif pada *Financial Inclusion* yang berarti bahwa semakin masyarakat memiliki persepsi yang baik terkait dengan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan di LPD maka semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan masyarakat yang berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi menggunakan akses layanan lembaga keuangan yaitu LPD.

Perceived risk management diartikan sebagai suatu persepsi yang dimiliki nasabah tentang ketidakpastian, ketidaknyamanan, serta suatu konsekuensi yang sifatnya negatif yang mana kemungkinan dihadapi oleh nasabah dalam proses penggunaan produk atau jasa layanan suatu perusahaan (Chin and

Zainal, 2015). Masyarakat atau nasabah yang percaya bahwa LPD tersebut telah dikelola secara baik sehingga terhindar dari berbagai bentuk risiko, ketidaknyamanan, ketidakpastian atau bahkan konsekuensi negatif, maka hal ini tentu saja akan mendorong sikap para nasabah atau masyarakat untuk senantiasa menggunakan jasa layanan yang diberikan oleh LPD.

Berbagai jenis risiko utama yang umumnya melekat pada lembaga keuangan termasuk juga pada LPD yang juga menjadi fokus utama penilaian dari para nasabah atau masyarakat diantaranya risiko *fraud*, risiko privasi, dan risiko informasi. Risiko *fraud* yang berkaitan dengan risiko kecurangan yang biasanya pihak manajemen lakukan mampu memberikan berbagai kerugian yang berhubungan dengan *financial* kepada nasabah, risiko privasi yang berkaitan dengan risiko penyebaran informasi pribadi nasabah yang bersifat rahasia, dan risiko informasi yaitu berkaitan dengan risiko atas informasi yang tidak relevan dan tidak akurat yang diberikan oleh manajemen lembaga keuangan. LPD yang mampu menunjukkan dan membuktikan bahwa berbagai macam risiko seperti risiko *fraud*, risiko privasi, dan risiko informasi yang dapat merugikan nasabah tersebut tidak pernah terjadi karena adanya manajemen risiko yang baik oleh pihak LPD, maka nasabah atau masyarakat akan semakin loyal untuk bertransaksi menggunakan jasa layanan LPD dan sikap inilah yang akan semakin mendorong peningkatan *Financial Inclusion*. Penelitian ini mendapatkan dukungan dari penelitian lain dari Putra dan Puspita (2019) dimana dijelaskan di penelitian tersebut jika secara bersama-sama persepsi dari risiko, kepercayaan, suatu manfaat serta kemudahan di dalam penggunaan mampu memberikan efek pada penggunaan atas *internet banking* yang mana ini merupakan sebuah layanan jasa yang ditawarkan oleh perbankan. Hasil ini

juga didukung oleh teori perilaku konsumen dari Kotler and Keller (2012) yang menyatakan bahwa perilaku penggunaan suatu produk atau layanan salah satunya dipengaruhi oleh faktor psikologi yang terdiri dari persepsi, motivasi, keyakinan, dan pengetahuan. Persepsi nasabah atau masyarakat terkait dengan pengelolaan risiko atas produk atau layanan suatu lembaga keuangan seperti LPD sangat berpengaruh terhadap penggunaan layanan yang disediakan oleh LPD tersebut.

Dari hasil analisis kualitatif juga dapat disimpulkan bahwa nasabah merasa aman bertransaksi di LPD karena mendapatkan bukti transaksi yang terbentuk dari sistem *online* secara langsung dan juga nasabah akan menerima informasi melalui pesan sms jika dana simpanan mereka sudah terinput dalam sistem LPD dan telah menambah saldo rekening mereka di LPD demikian juga sebaliknya untuk transaksi penarikan dana, akan tetapi berdasarkan hasil kategorisasi data persepsi nasabah terhadap pengelolaan risiko (*perceived risk management*) masih tergolong sedang. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya kasus-kasus penyelewengan dana oleh karyawan LPD yang berdampak pada ketidakamanan dana nasabah apalagi terdapat pemberitaan bahwa terjadi satu kasus penyimpangan dana oleh karyawan di LPD Rendang pada akhir tahun 2019, tentu saja memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mengembalikan kepercayaan dan persepsi masyarakat terhadap keamanan layanan LPD. LPD harus terus melakukan pembenahan didalam sistem pengendalian internal yang juga dapat dibantu oleh pengamanan melalui penggunaan teknologi berbas otorisasi akses didalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

Pengaruh *Tri Hita Karana* pada *Financial Inclusion*

Hasil regresi menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima yang berarti bahwa *Tri Hita Karana* berpengaruh

positif pada *Financial Inclusion* yang berarti bahwa semakin LPD mengimplementasikan konsep *Tri Hita Karana* didalam aktivitas operasionalnya yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat sekitar maka semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan masyarakat yang berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi menggunakan akses layanan lembaga keuangan yaitu LPD.

LPD sebagai salah satu lembaga keuangan yang dibentuk secara khusus berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang juga beroperasi atas dasar hukum Desa Adat di Bali memiliki keunikan yaitu berkedudukan di wewidangan desa adat, dan desa adat yang mana dijadikan sebagai suatu kesatuan dari masyarakat hukum adat yang berpedoman pada prinsip *Tri Hita Karana* dimana di bersumber dari suatu kearifan lokal yang disebut dengan *Sad Kerthi*, yang di dalamnya terdapat nilai budaya dan juga kearifan lokal yang ada di Bali. Atas dasar itulah LPD harus senantiasa memegang teguh dan mengimplementasikan filosofi budaya *Tri Hita Karana* sebagai budaya organisasi.

Implementasi budaya organisasi juga diyakini dapat mempengaruhi kepuasan pengguna yang pada akhirnya berdampak pada perilaku nasabah dalam penggunaan layanan. Pernyataan itu relevan dengan penelitian oleh Qamariah (2019), dimana dijelaskan jika budaya yang dimiliki organisasi mampu memberikan efek pada penggunaan suatu layanan oleh konsumen. Filosofi budaya *Tri Hita Karana* yang terdiri dari konsep *Parahyangan*, *Palemahan* dan *Pawongan* yang dijadikan sebagai budaya organisasi LPD merupakan konsep yang dapat mendekatkan LPD dengan para nasabahnya. Dalam konsep *Parahyangan*, tata kelola LPD harus memperhatikan adanya eksistensi dari perwujudan bangunan suci. Di tempat suci komunitas manusia dapat melakukan

sujudnya kepada Tuhan. Dengan implementasi ini maka setiap karyawan LPD menjadi mampu mengimplementasikan ajaran agama melalui baiknya hal yang dipikirkan, baiknya sesuatu yang dikatakan, serta baiknya sesuatu dilakukan. Sujud bakti kepada Tuhan juga akan membawa umat manusia menuju pikiran yang suci, dan ketulusan dalam memberikan pelayanan dengan penuh itikad baik kepada para nasabah atau masyarakat, sehingga masyarakat selaku nasabah menjadi nyaman didalam melakukan transaksi di LPD. Dalam aspek *Pawongan*, pengelola LPD harus menghormati hak-hak individu dan memberikan pandangan dari manusia ke manusia lain yang mana sebagai seseorang yang setara serta sepadan, baik itu bagi karyawan ataupun bagi masyarakat selaku konsumen LPD. Melalui implementasi ini, tentu semakin mempererat rasa kebersamaan diantara para karyawan dan juga semakin menciptakan loyalitas nasabah kepada LPD. Dan dalam aspek *Palemahan*, LPD juga memperhatikan lingkungan alam melalui wujud menjaga kebersihan lingkungan kerja dan sekitarnya sehingga mampu menciptakan suasana yang nyaman dan sehat bagi para karyawan dan bagi para nasabah yang berkunjung. Berbagai bentuk kenyamanan baik dari segi kenyamanan psikologi yang tercipta melalui komunikasi yang harmonis (*pawongan*), penerimaan pelayanan prima yang dirasakan oleh nasabah atau masyarakat melalui ketulusan dan itikad baik para karyawan LPD (*parahyangan*), dan situasi tempat pelayanan yang bersih (*palemahan*) tentunya akan mendorong keinginan dan sikap para nasabah atau masyarakat untuk bertransaksi menggunakan jasa layanan LPD dan sikap inilah yang akan semakin mendorong peningkatan *Financial Inclusion*. Dari hasil analisis kualitatif juga dapat disimpulkan bahwa karena perasaan nyaman dengan layanan LPD, aman

dengan layanan LPD, dan dipermudah juga oleh adanya layanan *E-Link* berdampak pada semakin seringnya nasabah LPD dan bahkan masyarakat non nasabah LPD menggunakan akses layanan LPD didalam bertransaksi keuangan. Namun berdasarkan hasil kategorisasi data diperoleh informasi bahwa *Financial Inclusion* masyarakat pedesaan terhadap jasa layanan LPD terkategori sedang, dan jika ditinjau lebih mendalam dalam pernyataan hasil kuesioner yang diberikan kepada nasabah banyak nasabah yang memberikan penilaian tidak setuju pada pernyataan “saya lebih sering bertransaksi secara nontunai menggunakan *E-Link* daripada bertransaksi secara tunai dalam menjalankan usaha”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan *E-Link* di LPD masih belum optimal yang tentunya disebabkan oleh masih awamnya masyarakat pedesaan terhadap teknologi akan tetapi hal ini harus semakin memacu LPD menjadi lembaga di bidang keuangan yang dimiliki oleh desa adat yang mampu dekat dengan masyarakat pedesaan untuk terus mengedukasi para nasabahnya dan tentunya juga mengedukasi seluruh masyarakat yang berada pada lingkup desa adat masing-masing terkait pemanfaatan teknologi didalam melakukan transaksi keuangan, dan semakin memperkenalkan berbagai bentuk jasa layanan yang disediakan oleh LPD yang sangat bermanfaat dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti produk tabungan dengan suku bunga yang tinggi hingga penyediaan produk kredit yang dapat membantu peningkatan usaha masyarakat.

KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

E-Link Service berpengaruh positif pada *Financial Inclusion* yang berarti bahwa semakin masyarakat merasakan kebermanfaatan *E-Link Service* yang diberikan oleh pihak LPD maka semakin

tinggi pula tingkat inklusi keuangan masyarakat yang berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi menggunakan akses layanan lembaga keuangan yaitu LPD. *Perceived Risk Management* berpengaruh positif pada *Financial Inclusion* yang berarti bahwa semakin masyarakat memiliki persepsi yang baik terkait dengan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan di LPD maka semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan masyarakat yang berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi menggunakan akses layanan lembaga keuangan yaitu LPD. *Tri Hita Karana* berpengaruh positif pada *Financial Inclusion* yang berarti bahwa semakin LPD mengimplementasikan konsep *Tri Hita Karana* didalam aktivitas operasionalnya yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat sekitar yang akan memberikan peningkatan pula pada inklusi keuangan masyarakat yang berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi menggunakan akses layanan lembaga keuangan yaitu LPD.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang meliputi tidak meninjau lebih mendalam pada persepektif eksternal seperti regulasi terkait LPD untuk menilai peran LPD didalam membantu peningkatan *financial inclusion*. Maka dari itu penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperdalam dan memperluas kajian dengan mendeskripsikan regulasi terkait LPD dan implementasinya untuk meninjau optimalisasi peran LPD didalam membantu peningkatan *financial inclusion* khususnya bagi masyarakat pedesaan.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil kategorisasi data yang berasal dari penilaian para nasabah diperoleh hasil bahwa secara umum nasabah memberikan penilaian terhadap kebermanfaatan *E-Link Service* yang disediakan oleh LPD berada pada kategori sedang, secara umum *Perceived Risk*

Management nasabah pada LPD berada pada kategori sedang, secara umum nasabah memberikan penilaian implementasi *Tri Hita Karana* pada LPD berada pada kategori sedang, dan secara umum *Financial Inclusion* masyarakat pedesaan terhadap jasa layanan LPD terkategori sedang. Maka dari itu yang dihasilkan dari penelitian ini mampu dijadikan sebuah pedoman untuk para manajemen dari LPD dalam melakukan peningkatan ataupun berbagai bentuk perbaikan untuk menuju pemberian layanan *E-Link Service* secara prima, pengimplementasian *Risk Management* dan konsep *Tri Hita Karana* secara lebih optimal untuk semakin mengoptimalkan penggunaan layanan jasa LPD dari para nasabah atau masyarakat. Peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan jasa layanan LPD tentunya akan sangat mendorong pertumbuhan LPD karena berdasarkan hasil penelitian ini juga telah terbukti bahwa *E-Link Service*, *Perceived Risk Management* dan konsep *Tri Hita Karana* berpengaruh positif pada *Financial Inclusion*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). Strengthening Financial Technology Regulation To Empowerment Financial Inclusive. *Diponegoro Law Review*, 4(2), 274. <https://doi.org/10.14710/dilrev.4.2.2019.274-290>
- Adriani, D., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Inklusi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Pertumbuhan Umkm Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(12), 6420. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i12.p02>
- Anderson, A. (2017). Precautionary savings, retirement planning and misperceptions of financial literacy. *Journal of Financial Economics*,

- 126(2), 383–398.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X17301551>
- Anisa. (2016). *Pengaruh Persepsi terhadap Minat Penggunaan Internet Banking Bank Muamalat Indonesia Tulungagung*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Bank Indonesia. (2019). *Program Keuangan Inklusif*.
<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/Contents/default.aspx>.
- CCmara, N., & Tuesta, D. (2015). Measuring Financial Inclusion: A Multidimensional Index. In *SSRN Electronic Journal* (Issue September).
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2634616>
- Chin P.Lai, and Z. A. . (2015). Perceived Risk As An Extension To TAM Model: Consumers' Intention To Use A Single Platform E-Payment. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 9(2), 323–331.
- Daryanto, dan M. R. (2016). *Teori Komunikasi* (Yogyakarta). Gava Media.
- Davis, Fred D., et. al. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8), 982–1002.
- Eltin, G. Q. (2019). *Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Niat Berperilaku Dalam Mengadopsi Financial Technology (Fintech)*. Universitas Lampung.
- Fitriyah, A. (2020). *Pengaruh Promosi, Harga, Kualitas Informasi, dan Persepsi Risiko terhadap Keputusan Pembelian Online di Shoopee.co.id (Studi pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik Angkatan Tahun 2019)*. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Fungacova, Zuzana, and L. W. (2015). Understanding financial inclusion in China. *China Economic Review*, 34, 196–206.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1043951X14001709>
- Irsyadinnas, A. (2019). Analisis Peran Inklusi Keuangan terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia Tahun 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7(2), 89–102.
- Kesa, Deni Danial. (2019). Realisasi Literasi Keuangan Masyarakat Dan Kearifan Lokal : Studi Kasus Inklusi Keuangan Di Desa Teluk Jambe. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(2), 34–43.
- Kotler, P, and Armstrong, G. (2010). *Principles of Marketing*. Prentice Hall.
- Kotler, Philip, and K. L. K. (2012). *Marketing Management: Fourteenth Edition*. Person Education, inc.
- Kunt, Asli Demirgüç, L. K. (2013). Financial Inclusion in Africa: An Overview. In *World Bank Group*.
- Kusumawati, N. (2020). *Pengaruh Prilaku Konsumen Terhadap Keputusan Membeli Tempe (Studi Kasus Konsumen Di Pasar Merapi Lampung Tengah)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Masnita, Y., Triyowati, H., & Khomsiyah, K. (2020). Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Peran Inklusi Keuangan. *JUARA: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera*, 1(1), 26.
<https://doi.org/10.25105/juara.v1i1.5911>
- Melanda, Y. (2019). *Pengaruh Kedekatan Emosional Dan Atmosphere Terhadap Loyalitas Nasabah Bri*

- Link (Studi Di Kecamatan Bermaniilir Kabupaten Kepahiang). Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.*
- Mulasiswi, Cut Musni, Julialevi, K. O. (2020). Optimalisasi Financial Teknologi (Fintech) Terhadap Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Usaha Menengah Purwokerto. *Performance*, 27(1), 12–20.
- Nopiyani Putu Eka, Ni Made Wulan Sari Sanjaya, dan N. M. R. (2019). *Pengaruh Budaya Tri Hita Karana Pada Good Corporate Governance Dan Kualitas Laporan Keuangan*. 80–89.
- Mulyawan, I. P. A., Wirama, D. G., & Badera, I. D. N. (2017). Budaya Tri Hita Karana Sebagai Pemoderasi Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8, 3193. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i08.p10>
- Natalia, Maya Angela, Florentina Kurniasari, Ernie Hendrawaty, V. M. O. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Dengan Menggunakan Social Capital Sebagai Variabel Mediator. *Ultima Management*, 12(1), 16–33.
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12, 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, (2018).
- Pasal 1 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, (2019).
- Peter, J. P. and H. C. O. (2013). *Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Salemba Empat.
- Prabowo, D. N. C. (2019). *Pengaruh Perceived Risk Dan Perceived Technology Terhadap Online Purchase Intention Pada Shopee Dengan Online Trust Sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris Terhadap Masyarakat Magelang)*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Putra, Kevin Muhammad, dan P. K. S. (2019). Pengaruh Persepsi Nasabah Atas Risiko, Kepercayaan, Manfaat, Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Penggunaan Internet Banking (survey Pada Nasabah Bank Mandiri). *Eproceedings of Management Vol. 6, No. 2*.
- Qamariah, H. (2019). *Analisis Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Siasy UIN Suska Riau Menggunakan Metode OCAI dan EUC*. UIN Suska Riau.
- Rendra. (2011). *Perbedaan Perceived Risk Online Shoppers Dan Non-Online Shoppers Pada Jual Beli Online*. Universitas Indonesia.
- Sarma, M., & Pais, J. (2011). Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis. *In Annual Conference of the Human Development and Capability Association, New Delhi*, 168(10–13), 1–30. <https://doi.org/10.1002/jid>
- Septiyani, A. Dela. (2019). *Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pendapatan UMKM Di Kota Surakarta*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Subagia, N. K. W. (2016). *Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Tri Hita Karana Sebagai Implementasi Hukum Alam*. Universitas Lampung.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahroh, M. Z., Tarjo, & Setiawan, A. R. (2019). Minat Investasi Mahasiswa pada Kompetisi Yuk Nabung Saham 2017 di Bursa Efek Indonesia (Pendekatan Mixed Methods). *Journal of Research and Application: Accounting and Management*, 4(1), 64–77. <https://doi.org/10.18382/jraam.v4i1.005>
- Wildan, M. (2019). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech)*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Yanti, Iko Putri, W. (2019). Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Kecamatan Moyo Utara. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>
- Zins, A., & Weill, L. (2016). The determinants of financial inclusion in Africa. *Review of Development Finance*, 6(1), 46–57. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2016.05.001>